

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York, Chapter 1-2 dan 5.
- Armida. *Sistem Anggaran Pendidikan (Studi Tentang Sistem Penganggaran Pendidikan dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi*.
- Ahmadi, Drs. H. Abu dan Dra. Nur Uhbiyah. 2003. *Ilmu Pendidikan*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Metro. 2011. *Metro Dalam Angka Metro in Figure 2011*.
- Badan Pusat Statistik Kota Metro. 2012. *Metro Dalam Angka Metro in Figure 2012*.
- Badan Pusat Statistik Kota Metro. 2013. *Metro Dalam Angka Metro in Figure 2013*.
- Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
- Dun, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs. New Jersey, Chapter 1-3.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall, New Jersey, Chapter 1.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York. McGraw-Hill
- Ghazali, Abbas. 2000. *Analisis Biaya Manfaat SMU dan SMK*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* No. 022, tahun ke-5, Maret 2000.
- Halim, Abdul. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: *Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/ Tahun XIII/25.

- Huda, Noval Akhmad dan Hadi Sasana. 2013. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (studi kasus: Provinsi DKI Jakarta)*. Diponogoro Journal of Economics Vol 2, No. 1, Tahun 2013, Halaman 1.
- Isdijoso, Ir. Brahmantio dan Ir. Tri Wibowo. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus: Sektor Pendidikan Di Kota Surakarta)*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.6, no 1.
- Jones, Charles O. 1970. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Khusaini, Moh. 2007. *Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Anggaran Daerah : Studi Di Jawa Timur*. Jurnal of Indonesian Applied Economics Vol.1 No.1 Oktober 2007, 18-35.
- Mashuri, Saepudin.2009.*Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Implementasi Otonomi Pendidikan*.Jurnal Hunafa, Vol. 6 No.3, Desember 2009:347-358.
- Muqaddam, Abdi. 2011. *Analisis Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2004 – 2008*. Skripsi S1 Ekonomi Pembangunan. Unila. Bandar Lampung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 22 Tentang Rencana Keuangan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Standar Biaya Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 Ayat 4 Tentang Komponen Biaya Operasional Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Penetapan Kebijakan Operasional Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Publisher, Chicago, Chapter 1-4.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Supriyadi, Ujang Didi. 2009. *Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali*. Jurnal Kependidikan, Volume 39, Nomor 1, Mei 2009, hal. 11-26.
- Toyamah, Nina dan Syaikh Usman. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Lembaga Penelitian SMERU, Juni 2004.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Hak Memperoleh Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Tentang Fungsi Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab VIII Pasal 179 Tentang Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Rencana Keuangan Tahunan Daerah.

- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, 2004, hal. 1-2. Jakarta.
- Wati, Widya. 2010. *Makalah Strategi Pembelajaran Permasalahan Pendidikan Di Indonesia*. Universitas Negeri Padang.
- Widianingsih, Yuni Pristiwati Noer. 2011. *Mengukur Alokasi Anggaran Untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi Kasus APBD Kota Surakarta)*. Talenta Ekonomi –FE UKS- Vol.2, No.1, Januari – Juni 2011.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Press. Yogyakarta.
- Winarti. 2009. *Analisis Kebijakan Desentralisasi Fiskal Sektor Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kota Bandar Lampung)*. Skripsi S1 Ekonomi Pembangunan. Unila. Bandar Lampung.